

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 2

Pansus Angket Mau Tindak Lanjuti Audit BPK

● FAUZIAH MURSID, UMAR MUKHTAR

JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan ada sejumlah temuan laporan keuangan KPK yang perlu ditindaklanjuti pansus. Kesimpulan ini diperoleh setelah Pansus Angket menggelar pertemuan dengan BPK terkait laporan hasil audit keuangan KPK.

Agun mengatakan, Pansus Angket sudah meminta laporan proses audit pemeriksaan hasil pertanggungjawaban KPK sejak berdiri pada BPK. Yakni, penggunaan keuangan berkaitan tugas pokok dan fungsi KPK mulai tugas ko-

ordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

"Itu yang kami mintakan ke BPK secara keseluruhan dan ternyata dari hal-hal tersebut kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti," ujar Agun melalui siaran persnya di gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (4/7).

Agun mengatakan, salah satu yang perlu ditindaklanjuti oleh Pansus Hak Angket berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait penyidik KPK. Namun, politikus Partai Golkar itu enggan menjelaskan detail persoalan terkait SDM. Agun justru menambah pokok masalah yang perlu ditindaklanjuti, yaitu terkait kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK.

"Apakah penyadapan-penyadapan ini sudah memiliki landasan hukum

yang cukup, ini akan kami dalam lebih jauh mungkin kita akan ke Kominfo atau provider Telkomsel misalnya," kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, temuan lain juga berkenaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada 2015-2016. Agun menyebut, dalam audit medio tahun itu, hasil audit anggaran KPK ditemukan catatan tidak sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan internal.

"Audit itu mengenal dua, ada temuan yang memang kesesuaian dengan sistem pengelolaan keuangan internal, dan ada soal kepatuhan terhadap UU (undang-undang). Dan ternyata memang ada hal-hal yang memang tidak patuh dan ada juga tidak sesuai SPI baik di 2015-2016," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, BPK

juga menyerahkan hasil audit pemeriksaan terhadap keuangan KPK. Penyerahan hasil audit dilakukan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerjaja Djanegara kepada Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

"Kita diskusikan dan kita menyampaikan apa-apa hasil temuan BPK. Tentu kami semua serahkan kepada Pansus Angket KPK," ujar Moermahadi.

Hasil audit yang diserahkan BPK ke Pansus Hak Angket adalah hasil audit KPK sejak 2006 hingga 2016. Antara lain berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Apa yang dikatakan Pak Agun apa yang menjadi tugas BPK, dan BPK akan selalu melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan tanggung jawab

negara dan menindaklanjuti laporan pada lembaga perwakilan," ujarnya.

Pansus Hak Angket juga berencana mengunjungi narapidana tindak pidana korupsi untuk menggali keterangan. Namun, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Effendy BP menyatakan pihaknya belum menerima surat dari Pansus Angket KPK yang berisi rencana pansus menemui narapidana korupsi.

"Belum, belum, sejauh kita belum menerima," kata dia, Selasa (4/7).

Jika nantinya Kemenkumham menerima surat tersebut, akan dikoordinasikan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menampung narapidana korupsi. Prinsipnya, kata dia, Kemenkumham melayani. ■ ed: agus raharjo